

Evaluasi Kinerja BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah

Miralda Salsabila Aisyah¹, Adela Amanda², Isna Fakia³, Mariana Mariana⁴

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia^{1,2,3,4}

miraldasalsabila10@gmail.com¹, adelaamanda23@gmail.com², isnafakia22@gmail.com³, mariana@pnl.ac.id⁴

Diserahkan tanggal 16 September 2024 | Diterima tanggal 26 Desember 2024 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2024

Abstract:

This study aims to analyze the effectiveness of audits conducted by the Audit Board of Indonesia (BPK) in enhancing the accountability of regional financial management through the identification of deviations and implementable recommendations. The study also aims to assess the capacity and independence of BPK, including auditor competence and the utilization of technology, in maintaining the objectivity and quality of regional government financial oversight. The research methodology uses a literature review approach, analyzing, comparing, and synthesizing various relevant sources such as academic journals, books, and other documents. The literature review is a method placed at the top of the hierarchy of evidence, providing a strong theoretical foundation and high reliability in understanding a particular issue. The findings of this study indicate that BPK plays an important role in promoting transparency and accountability in regional financial management. The effectiveness of the audit is reflected in the quality of findings and recommendations, although it is often hindered by the low implementation of recommendations by regional governments. Additionally, auditor capacity, the use of modern technology, and BPK's independence are key factors influencing the success of oversight. Challenges such as political intervention and resource limitations need more attention to improve BPK's performance.

Keywords: *Audit effectiveness, financial accountability, regional financial oversight.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui identifikasi penyimpangan dan rekomendasi yang implementatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kapasitas dan independensi BPK, termasuk kompetensi auditor serta pemanfaatan teknologi, dalam menjaga objektivitas dan kualitas pengawasan keuangan pemerintah daerah. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan literature review, yang menganalisis, membandingkan, dan mensintesis berbagai sumber relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lainnya. Literature review merupakan metode yang berada di puncak hierarchy of evidence, memberikan landasan teoritis yang kuat dan keandalan tinggi untuk memahami suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas audit terlihat dari kualitas temuan dan rekomendasi, meskipun sering terkendala oleh rendahnya pelaksanaan rekomendasi oleh pemerintah daerah. Selain itu, kapasitas auditor, pemanfaatan teknologi modern, dan independensi BPK merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pengawasan. Tantangan seperti intervensi politik dan keterbatasan sumber daya perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan performa BPK.

Kata Kunci: *Efektivitas audit, akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah translate*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu usaha untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara oleh instansi negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan. Dengan adanya pemeriksa oleh BPK tersebut, maka diharapkan pengelolaan keuangan negara terbebas dari praktik curang atau korupsi yang dapat merugikan negara. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar ini". Salah satu kedaulatan yang mendasar adalah pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Tugas pelaksanaan kedaulatan ini sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 diberikan kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) (Fauziah, 2017; Ida et al., 2011).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1999 telah memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan memiliki kewenangan luas dalam mengembangkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat (Widyatama & Meylani, 2014). Namun, pelaksanaan otonomi daerah juga diikuti dengan tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk adanya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Nurhadianto & Khamisah, 2019; Ritonga & Syahrir, 2016). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien (Defitri, 2018; Sipi & Tandi, 2021). Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan standar atau tolok ukur kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel (Rahmi & Sari, 2023; Ratnawati & Sari, 2023).

Untuk menguji kinerja pemerintah daerah, diperlukan evaluasi kinerja keuangan yang akan dijadikan sebagai standar dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun berikutnya (Ratnawati & Sari, 2023; Undang, 2024). Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga harus didukung oleh kepemimpinan yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Daerah, 2021; Undang, 2024). Namun, dalam pelaksanaannya, otonomi daerah masih menghadapi beberapa kendala, seperti kemandirian daerah yang masih tergantung pada pemerintah pusat, serta masalah-masalah lain terkait pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat (Dirja, 2021; Zulfia et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada (Bahasoan et al., 2024).

Pengukuran kinerja merupakan unsur yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diterapkan. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Liza & Mariana, 2023; Mariana & Rahmaniar, 2022; Ramadana et al., 2023). Hasil pemeriksaan yang dilakukan atas laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD menjadi topik utama dalam menilai akuntabilitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi salah satu pilar utama dalam *good governance*. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik, penelitian

ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta evaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola keuangan, mengoptimalkan sumber daya, dan meminimalkan potensi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui identifikasi penyimpangan dan rekomendasi yang implementatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kapasitas dan independensi BPK, termasuk kompetensi auditor dan pemanfaatan teknologi, dalam menjaga objektivitas dan kualitas pengawasan keuangan pemerintah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Literatur review merupakan suatu kajian ilmiah yang berfokus pada satu topik tertentu dengan cara menganalisis, membandingkan, dan mensintesis berbagai sumber dari jurnal ilmiah, buku, artikel, maupun dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Hendra et al., 2024; Mariana, 2023; Mariana et al., 2024; Nufiar et al., 2020; Sibarani, 2023; Sudirman & Tiarapuspa, 2023; Wahyudi & Mariana, 2024). Kajian ini tidak hanya sekadar meringkas isi dari literatur yang ada

Sebagai salah satu metode dalam penelitian, literatur review berada pada posisi paling atas dalam hierarchy of evidence, yang mengindikasikan bahwa teknik ini memiliki tingkat keandalan yang tinggi untuk membuktikan atau memahami suatu masalah tertentu secara ilmiah. Posisi tersebut diperoleh karena literatur review mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah teruji validitasnya. Selain itu, kajian ini memberikan peneliti kemampuan untuk mengevaluasi dan memilih pendekatan atau teori yang paling relevan dan efektif dalam menjawab pertanyaan penelitian.

RESULTS

Dalam penelitian ini, tabel berikut menyajikan ringkasan literatur yang telah dikaji untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Tabel ini menggambarkan berbagai penelitian yang menyoroti pengaruh karakteristik pemerintah daerah, peran lembaga pengawas seperti BPK, serta tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan otonomi daerah. Setiap sumber literatur memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan dan pembangunan ekonomi.

Tabel 1 Ringkasan Literatur atau Tabel Analisis Literatur

No	Scope Literatur	Jumlah	Persentase (%)
1	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Noviyanti & Kiswanto, 2016)	1	12.5
2	Peran BPK sebagai lembaga pengawas eksternal keuangan negara (Kaldera et al., 2020)	1	12.5
3	Efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Wijaya et al., 2022)	1	12.5

No	Scope Literatur	Jumlah	Persentase (%)
4	Efektivitas peran BPKP dalam pembinaan dan pengawasan SIMDA (Wibisono, 2018)	1	12.5
5	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan (Defitri, 2018)	1	12.5
6	Pengaruh hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Parwanto & Harto, 2017)	1	12.5
7	Hubungan antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Bahasoan et al., 2024)	1	12.5
8	Kendala dan optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang terkait otonomi daerah (Dirja, 2021)	1	12.5
Total		8	100

Tabel 1 di atas menyajikan analisis literatur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengawasan di pemerintah daerah, yang dibagi menjadi delapan topik utama. Setiap literatur memberikan kontribusi yang sama besar, yaitu 12,5% terhadap keseluruhan kajian. Pertama, Noviyanti & Kiswanto (2016) meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, Kaldera et al. (2020) mengulas peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas eksternal keuangan negara. Wijaya et al. (2022) membahas efektivitas tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sedangkan Wibisono (2018) meneliti peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Defitri (2018) mengeksplorasi pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara Parwanto & Harto (2017) menilai dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan daerah. Bahasoan et al. (2024) mengkaji hubungan antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan Dirja (2021) membahas kendala serta upaya optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang terkait otonomi daerah. Setiap studi ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

Kinerja BPK dalam Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui hasil audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diberikan oleh BPK mencerminkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun, hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya disparitas kualitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Noviyanti & Kiswanto (2016), pada periode 2008–2012 hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang berhasil memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) masih cukup sering ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum mampu memenuhi standar pelaporan yang baik. Salah satu faktor yang memengaruhi opini laporan keuangan ini adalah ukuran pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan total aset dalam neraca. Ukuran ini menjadi indikator kapasitas pengelolaan sumber daya keuangan, meskipun pengaruhnya masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Selain itu, peran BPK sebagai lembaga pengawas eksternal keuangan negara juga sangat berpengaruh. Kaldera et al. (2020) meneliti bagaimana BPK berfungsi dalam mengawasi keuangan negara, termasuk pengelolaan keuangan daerah, serta bagaimana peran BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK memiliki dampak besar terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seperti yang dibahas oleh Wijaya et al. (2022), mengkaji bagaimana tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Di sisi lain, peran BPKP dalam pembinaan dan pengawasan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) juga penting untuk memastikan kualitas laporan keuangan. Wibisono (2018) meneliti peran BPKP dalam mengawasi SIMDA dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ini menjadi relevan mengingat pengelolaan keuangan yang efisien sangat bergantung pada sistem informasi yang tepat.

Pengelolaan keuangan daerah dan penerapan sistem akuntansi yang baik juga memengaruhi kualitas laporan keuangan yang diaudit oleh BPK. Defitri (2018) membahas hubungan antara pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi, dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan yang diaudit oleh BPK. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara pengelolaan keuangan yang baik dengan sistem akuntansi yang tepat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Tidak kalah penting, hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan daerah memberikan dampak yang signifikan. Parwanto & Harto (2017) meneliti bagaimana hasil pemeriksaan BPK dapat memengaruhi perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Hal ini menjadi faktor penting dalam menentukan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah.

Variasi temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara otonomi daerah dan kinerja keuangan daerah. Hubungan antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pengelolaan keuangan daerah berperan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Penelitian ini relevan karena memberikan perspektif baru mengenai dampak otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan (Bahasoan et al., 2024). Menelaah berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang otonomi daerah dan langkah-langkah optimalisasi yang perlu diambil untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Hal ini menjadi penting karena tanpa implementasi yang efektif, tata kelola keuangan daerah tidak akan dapat berjalan sesuai dengan harapan (Dirja, 2021).

Dengan melihat hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah membutuhkan evaluasi menyeluruh, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan serta meningkatkan pengelolaan sumber daya menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Efektivitas Audit dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Efektivitas audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan elemen kunci dalam mendukung terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang mencakup temuan audit, analisis ketidakpatuhan, dan rekomendasi perbaikan, menjadi indikator utama efektivitas audit tersebut (Kaldera et al., 2020). Semakin relevan temuan yang disampaikan dan semakin implementatif rekomendasi yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas audit. Misalnya, audit yang berhasil mengidentifikasi potensi kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran dapat menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Namun, efektivitas audit tidak hanya diukur dari kualitas LHP, tetapi juga dari sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Wijaya et al., 2022). Tindak lanjut ini mencakup langkah-langkah konkret, seperti pengembalian kerugian negara, perbaikan sistem pengelolaan keuangan, atau penerapan regulasi baru. Sayangnya, rendahnya tingkat pelaksanaan rekomendasi masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perubahan yang signifikan. Hanya sebagian kecil rekomendasi yang sepenuhnya dilaksanakan, yang mencerminkan lemahnya pengaruh pengawasan BPK terhadap perubahan sistemik (Wijaya et al., 2022).

Selain itu, karakteristik pemerintah daerah, seperti ukuran dan total aset, juga memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan daerah yang diperoleh dari BPK (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Karakteristik ini dapat memengaruhi seberapa efektif audit dalam mendorong akuntabilitas keuangan daerah. Sebagai contoh, pemerintah daerah dengan aset yang lebih besar cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih kompleks, yang membutuhkan audit yang lebih mendalam dan cermat.

Pengawasan BPK tidak hanya terbatas pada audit keuangan, tetapi juga berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Peran BPK dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan dan memberikan rekomendasi sangat penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik (Kaldera et al., 2020). Selain itu, lembaga lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga turut berperan dalam membina dan mengawasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), yang merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah (Wibisono, 2018).

Karena itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak pengawasan BPK terhadap pengambilan keputusan di tingkat daerah. Koordinasi yang lebih intensif antara BPK dan lembaga terkait, seperti inspektorat daerah atau Kementerian Dalam Negeri, juga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dapat diintegrasikan dalam kebijakan strategis daerah. Dengan demikian, audit yang dilakukan oleh BPK tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis, tetapi juga sebagai katalisator perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

Kapasitas dan Independensi BPK dalam Pengawasan Keuangan

Kapasitas auditor merupakan elemen penting dalam pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aspek ini mencakup kompetensi teknis, pengalaman profesional, dan pemahaman terhadap konteks lokal di setiap daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Wibisono (2018), kapasitas auditor yang memiliki pengetahuan mendalam tentang

karakteristik keuangan daerah, seperti tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dan kemajuan teknologi di daerah tersebut, akan lebih efektif dalam melakukan audit. Auditor yang kompeten dapat mengidentifikasi masalah keuangan yang lebih kompleks dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan. Namun, kapasitas BPK sering terhambat oleh keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan beban kerja yang besar, yang mengurangi efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut BPK untuk terus meningkatkan kemampuan teknisnya dalam memanfaatkan alat bantu audit modern. Pemanfaatan teknologi seperti big data analytics dan sistem informasi keuangan memungkinkan BPK untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengidentifikasi pola anomali keuangan dengan lebih cepat dan tepat (Wibisono, 2018). Namun, implementasi teknologi ini membutuhkan investasi yang besar dan pelatihan berkelanjutan bagi auditor, yang sering menjadi tantangan, terutama dengan keterbatasan anggaran operasional yang dimiliki oleh BPK. Oleh karena itu, meskipun teknologi dapat meningkatkan kualitas audit, penerapannya memerlukan upaya yang cukup besar.

Independensi BPK juga menjadi kunci dalam menjaga objektivitas dan integritas hasil audit. Kaldera et al. (2020) menegaskan bahwa independensi lembaga ini penting untuk memastikan bahwa hasil audit BPK tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, baik dari pemerintah daerah yang diaudit maupun dari kepentingan politik lainnya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada DPR dan masyarakat, BPK harus bebas dari intervensi politik atau pengaruh eksternal lainnya yang dapat mengurangi kredibilitas hasil audit. Namun, dalam praktiknya, independensi BPK sering kali terancam oleh hubungan personal atau kepentingan politik yang melibatkan pejabat di tingkat daerah. Untuk menjaga independensi ini, BPK perlu memperkuat mekanisme internal dan memastikan bahwa auditor bekerja sesuai dengan standar profesi yang tinggi tanpa adanya tekanan dari luar.

Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah juga tidak bisa diabaikan. Karakteristik seperti ukuran dan total aset daerah berperan penting dalam memengaruhi opini laporan keuangan yang diberikan oleh BPK. Pemerintah daerah dengan ukuran lebih besar dan total aset yang lebih tinggi cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif. Dalam konteks ini, BPK perlu lebih teliti dalam melakukan audit agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya pada daerah-daerah besar dengan aset yang kompleks (Noviyanti & Kiswanto, 2016).

Peran BPK dalam pengawasan keuangan negara sangat strategis, termasuk dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Lembaga ini tidak hanya mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan tetapi juga memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah (Kaldera et al., 2020). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan BPK sangat dipengaruhi oleh kualitas temuan dan rekomendasi yang diberikan, serta sejauh mana rekomendasi tersebut diterima dan diterapkan oleh pemerintah daerah.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas pengawasan BPK. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun temuan audit BPK sering kali akurat dan relevan, rendahnya tingkat implementasi rekomendasi menunjukkan bahwa pengawasan BPK belum sepenuhnya optimal (Wijaya et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat dan mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai pengaruh rekomendasi terhadap perubahan kebijakan di daerah.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi yang diterapkan juga memengaruhi kualitas laporan keuangan yang diaudit oleh BPK. Daerah yang memiliki sistem akuntansi yang transparan dan efisien cenderung menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik, yang pada gilirannya mempermudah proses audit oleh BPK (Defitri, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu fokus pada perbaikan sistem akuntansi untuk mendukung keberhasilan pengawasan BPK.

Secara keseluruhan, kapasitas dan independensi BPK adalah dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan keuangan daerah. BPK yang memiliki kapasitas tinggi dalam melakukan audit serta independensi yang terjaga akan lebih mampu memberikan rekomendasi yang dapat mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan keuangan pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa peran BPK sangat penting dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas audit BPK dapat dilihat dari kualitas temuan dan rekomendasi yang diberikan, namun pelaksanaannya sering terkendala oleh rendahnya tingkat tindak lanjut dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan implementasi rekomendasi guna mencapai perbaikan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kapasitas dan independensi BPK menjadi elemen kunci dalam menjaga objektivitas dan efektivitas pengawasan. Peningkatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi modern, dan penguatan independensi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan seperti intervensi politik dan keterbatasan sumber daya. Dengan langkah-langkah strategis ini, BPK dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang kredibel, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Daerah, I. O. (2021). *Kepemimpinan yang efektif & Tata Kelola yang Baik pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Nurul Hasana Aswar E _ mail: hasananurul998@gmail.com Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*. 2014(12).
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Dirja, I. P. (2021). Kendala Dan Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 18(1), 52–62. <https://doi.org/10.21831/jep.v18i1.38183>
- Fauziah. (2017). Pengaruh Kompetensi, Independen, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit

- Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Auditor Bpk Perwakilan Provinsi Sumatera Utara). *Owner*, 1(1), 37–41. <https://doi.org/10.33395/owner>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Ida, R., Rawi, & Kamarudin. (2011). Analisis dampak motivasi dan profesionalisme terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. *Pekbis Jurnal*, 3(2), 456–466.
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 13–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>
- Liza, L., & Mariana, M. (2023). Can Budget Ratcheting Moderate the Relationship Between Financial Performance and Capital Expenditures? *Journal of Data Acquisition and Processing*, 38(3), 5472–5485. <https://doi.org/10.5281/zenodo.777718>
- Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak lhoknga. *Jurnal Tabqiqah : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 204–213.
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M., & Rahmani, R. (2022). Pengaruh Motivasi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.74>
- Mariana, M., Ramadani, D., Kheriah, K., & Hamdani, H. (2024). Dampak Implementasi Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Lhokseumawe. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 33–40. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1185>
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Characteristics, Regional Influence, BPK Government, Performance Audit, On Government, Finance. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>
- Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh hasil pemeriksaan bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 6, 1–9.
- Rahmi, H. S. L., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap

- Prediksi Financial Distress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145–156. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.12>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniari, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Ratnawati, R., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Provinsi Di Pulau Kalimantan Dan Sumatera Periode 2020-2022). *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 125. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1515>
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Sipi, A. D. S., & Tandi, A. (2021). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1–502.
- Sudirman, M. A. A., & Tiarapuspa. (2023). Masih Adakah Efek Kompensasi Terhadap Kinerja Yang Diberikan Karyawan? *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2441–2448. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16935>
- Undang, G. (2024). Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 121–130. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i1.35000>
- Wahyudi, W., & Mariana, M. (2024). Mengadaikan Kembali Tanah Gadai. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i2.228>
- Wibisono, A. F. (2018). Efektifitas Peran BPKP dalam Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 951–962.
- Widyatama, A., & Meylani, D. A. (2014). Kajian Deskripsi Pelaksanaan Otonomi Daerah Organisasi Perangkat Daerah (ODP). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 9(2), 38–50.
- Wijaya, D. A., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2022). Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. 9(1), 356–363.
- Zulfia, I. H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(2), 137–147. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i2.5263>